

PERAN INDUSTRI HALAL DALAM MEMPERKUAT PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

Oleh:

Malik Dilaga Kusumah¹

M Zulio Pratama²

Ivan Andika Putra³

Fairul Azmi⁴

Amalia Nuril Hidayati⁵

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Alamat: Jl. Mayor Sujadi No.46, Kudsan, Plosokandang, Kec. Kedungwaru,
Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur (66221).

Korespondensi Penulis: malikdilagaaaaa@gmail.com, julioblitar66@gmail.com,
ivanandikaputra18@gmail.com, irulfairul93@gmail.com, amalianoeril@gmail.com.

Abstract. *The halal industry has become one of the important pillars in strengthening the economy in Indonesia, especially with the majority of the population in Indonesia being Muslim. With the increase in global awareness of products based on sharia concepts, the halal industry is no longer limited to domestic needs, but becomes a strategic opportunity for international exports and investment. In Indonesia with the majority of the population being Muslim, this industry is an important pillar in encouraging growth through contributions in the food, cosmetics, pharmaceutical, and financial sectors, the development of the halal industry involves many roles at the regional level to the central government such as halal certification to be trusted in the eyes of the public, regulations, and support from institutions under the auspices of the Indonesian Ulema Council (MUI). With an inclusive and sustainable ecosystem, the halal industry has the potential to be a key indicator in creating potential growth. This research aims to examine the contribution of the halal industry to strengthening economic growth in Indonesia. The method used in this study is a descriptive-qualitative approach based on literature studies. The results of*

PERAN INDUSTRI HALAL DALAM MEMPERKUAT PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

the study show that the development of the halal industry has an impact on economic growth such as human resource empowerment and export expansion.

Keywords: *Indonesia, Halal Industry, Economic Growth.*

Abstrak. Industri halal telah menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat perekonomian di Indonesia, terutama dengan mayoritas penduduk di indoneesia beragama Islam. Dengan peningkatan kesadaran global terhadap produk-produk yang berdasarkan pada konsep syariah, maka industry halal tidak lagi terbatas pada kebutuhan domestik, tetapi menjadi peluang strategis bagi ekspor dan investasi internasional. Di indonesia dengan mayoritas penduduknya muslim, maka industri ini menjadi pilar penting dalam mendorong pertumbuhan malalui kontribusi di sektor makanan, kosmetik, farmasi, dan keuangan, pengembangan industri halal melibatkan banyak peran tingkat daerah hingga pemerintahan pusat seperti sertifikasi halal agar terpercaya di mata masyarakat, regulasi, dan dukungan dari lembaga dibawah naungan majelis ulama indonesia (MUI). Dengan ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan industri halal berpotensi menjadi indikator utama dalam menciptakan pertumbuhan yang potensial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kontribusi industry halal terhadap penguatan pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-kualitatif berbasis pada studi literatur. Hasil kajian menunjukkan pengembangan industry halal berdampak kepada pertumbuhan ekonomi seperti pemberdayaan sumber daya manusia dan perluasan ekspor.

Kata Kunci: Indonesia, Industri Halal, Pertumbuhan Ekonomi.

LATAR BELAKANG

Dalam beberapa dekade terakhir, industri halal telah mengalami pertumbuhan yang signifikan secara global. Industri halal dapat menjadi penyokong utama dari pertumbuhan ekonomi syariah yang saat ini sedang bertumbuh dengan pesat Pada triwulan pertama 2024, sektor unggulan *halal value chain* (HVC) mencatat pertumbuhan sebesar 1,94 persen *year on year* (y o y), dengan dua sektor utama yakni makanan dan minuman halal serta *modest fashion* yang mencatatkan pertumbuhan lebih tinggi, masing-

masing sebesar 5,87 persen dan 3,81 persen (y o y)¹. Jika melihat pertumbuhan industri halal, tidak hanya dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah populasi Muslim dunia, tetapi juga oleh kesadaran konsumen lintas agama terhadap pentingnya produk yang higienis, berkualitas, dan etis, yang menjadi prinsip kehalalan dari suatu produk atau barang yang ditawarkan dalam industri halal, sebagaimana Firman Allah Swt dalam Al-quran surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya :

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik (thayyib) yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu” (QS. 1 : 168)

Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi pusat ekonomi halal dunia, ditambah lagi dengan tingkat produksi industri halal di Indonesia yang tinggi, Pada periode antara Januari Oktober 2023, total nilai ekspor produk halal Indonesia mencapai USD 42,33 miliar, dengan surplus perdagangan sebesar USD 31,23 miliar.² Potensi industri halal di Indonesia tidak hanya terletak pada aspek ekonomi domestik, tetapi juga pada peluang ekspor yang luas dan kemampuan untuk menarik investasi asing dalam sektor-sektor berbasis halal. Industri halal mencakup berbagai subsektor penting, seperti makanan dan minuman halal, kosmetik dan farmasi halal, fashion muslim, serta sistem keuangan syariah. Industri halal akan terus berkembang karena kebutuhan dunia akan produk halal juga akan semakin bertambah, selain dikarenakan oleh kesadaran masyarakat dunia akan barang yang baik, higienis dan etis, tetapi juga dipicu oleh persentase mualaf di dunia saat ini sekitar 400% sejak dimulainya serangan dan genosida di Gaza.

¹ Indonesia.go.id. (2024, Oktober 3). *Industri halal, penopang pertumbuhan ekonomi nasional*. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8668/industri-halal-penopang-pertumbuhan-ekonomi-nasional?lang=1>

² Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). (2023). *Produk Halal Indonesia 2023 87% surplus Neraca Perdagangan Nasional*.

PERAN INDUSTRI HALAL DALAM MEMPERKUAT PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

Pada tahun 2024 Sektor makanan dan minuman halal mendominasi dengan nilai pangsa pasar di Indonesia mencapai USD 34,74 miliar³, yang kemudian memberdayakan pelaku ekonomi domestic sehingga dapat menjadi penggerak perekonomian yang strategis untuk memberdayakan pelaku usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM). Industri halal menjadi roda penggerak bagi perekonomian yang ada di Indonesia, dengan jumlah nilai pangsa pasar yang mencapai USD 279,26 miliar.

Industri halal menjadi trend ekonomi yang sedang berkembang secara global, terutama di negara yang mayoritas penduduknya muslim. Kesadaran masyarakat dunia akan kehygienisan, kesehatan dan berbagai faktor lainnya kemudian menjadikan industri halal mempunyai prospek yang cerah, dikarenakan permintaan yang selalu ada. Dengan prinsip-prinsip islam yang sangat manusiawi, maka farmasi halal dan kosmetik halal menjadi sangat menjanjikan karena konsumen dunia sudah percaya kepada loyalitas produsen muslim kepada prinsip-prinsip islam yang sangat mengutamakan konsumen. Kepuasan konsumen menjadi titik berat yang sangat diperhatikan dalam islam, banyak hadits dari nabi Muhammad SAW yang telah membahas mengenai hal ini. Dalam sebuah hadits nabi Muhammad SAW bersabda:

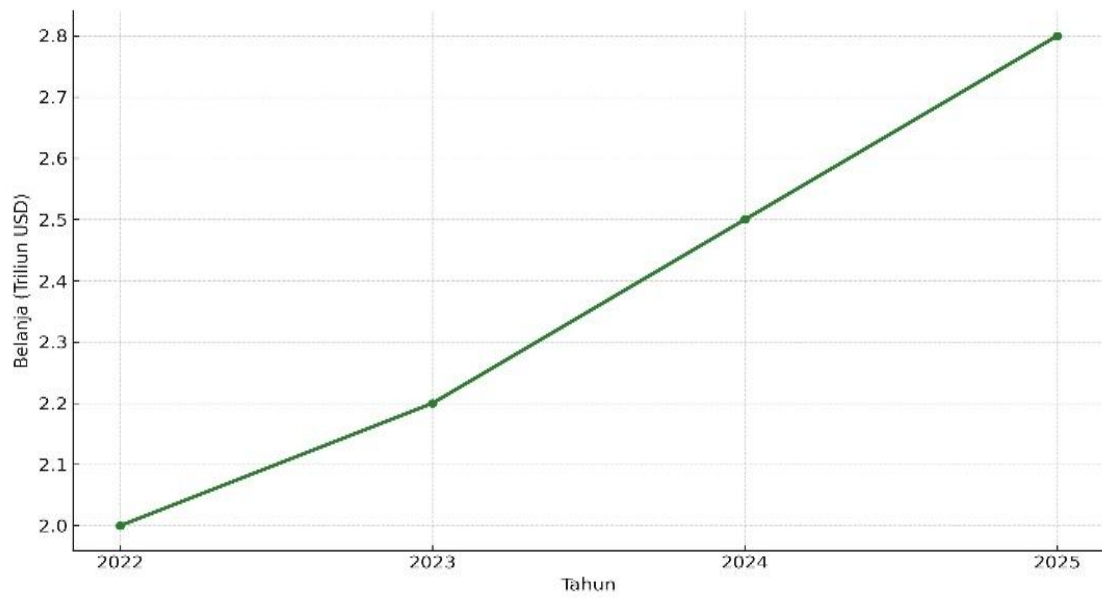
”Abdullah bin Abdul Hamzah berkata, "Aku telah membeli sesuatu dari Muhammad sebelum beliau menerima tugas kenabian dan karena masih ada suatu urusan dengannya maka aku menjanjikan untuk mengantarkan kepadanya tetapi aku lupa. Ketika teringat tiga hari kemudian, aku pun pergi ke tempat tersebut dan menemukan Muhammad masih berada di sana." Lalu Nabi SAW berkata, "Engkau telah membuatku resah, aku berada di sini selama tiga hari menunggumu."

Industri halal di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain peningkatan kesadaran konsumen Muslim terhadap pentingnya kehalalan produk, dukungan regulasi pemerintah melalui Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, serta meningkatnya daya beli masyarakat. Selain itu, kehadiran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) turut memperkuat struktur industri ini dengan sistem sertifikasi halal yang lebih sistematis dan terintegrasi. Dukungan dari sektor keuangan syariah, logistik halal, serta kehadiran kawasan industri halal seperti

³ Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. (2023). *Amanat agar ekonomi syariah bergerak lebih cepat*.

Halal Industrial Park Indonesia (HIPI) di Sidoarjo juga mendorong pertumbuhan yang pesat. Berikut ini ditampilkan grafik yang menggambarkan pertumbuhan industri halal di Indonesia, jika diukur dari total nilai belanja konsumen dari tahun ke tahun:

Gambar 1. Pertumbuhan Industri halal di Indonesia 2022-2025



Sumber: *DinarStandard, State of the Global Islamic Economy Report 2022.*

Grafik di atas menunjukkan proyeksi perkembangan industri halal global dari tahun 2022 hingga 2025, dengan belanja gaya hidup halal diperkirakan meningkat dari USD 2,0 triliun pada tahun 2022 menjadi USD 2,8 triliun pada tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata (CAGR) sekitar 7,5%, yang didorong oleh beberapa faktor, termasuk pertumbuhan populasi Muslim global, meningkatnya kesadaran konsumen terhadap kepatuhan syariah, serta dukungan pemerintah dalam memperkuat ekosistem halal. Dengan potensi pasar yang besar, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi pemain utama dalam industri halal global, termasuk di sektor makanan, fashion, farmasi, kosmetik.

Pemerintah Indonesia melalui berbagai kementerian dan lembaga telah menginisiasi regulasi dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri halal, seperti Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH), kemudian ada penguatan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Penguatan kapasitas pelaku usaha halal, dukungan regulasi yang

PERAN INDUSTRI HALAL DALAM MEMPERKUAT PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

adaptif, serta kemitraan strategis antara pemerintah dan sektor swasta menjadi factor yang sangat penting untuk menjadikan industri halal memperkuat pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Perkembangan Industri Halal

Pengembangan industri halal sebagai salah satu sektor strategis dalam perekonomian Indonesia dapat dianalisis melalui berbagai pendekatan teori ekonomi dan pembangunan yang relevan. Pertama, menurut Adam Smith dalam *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, pertumbuhan ekonomi terjadi ketika ada peningkatan produktivitas melalui spesialisasi dan efisiensi dalam produksi. Industri halal, dengan berbagai subsektor seperti makanan, kosmetik, farmasi, dan fashion, mencerminkan bentuk spesialisasi yang mendorong efisiensi dan pertumbuhan ekonomi nasional.⁴

Menurut David Ricardo, negara sebaiknya fokus pada produksi barang yang memiliki keunggulan komparatif, yaitu barang yang dapat diproduksi dengan efisiensi lebih tinggi dan biaya lebih rendah dibanding negara lain. Dengan potensi besar dalam produksi makanan dan minuman halal serta fashion muslim, Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang bisa dimaksimalkan melalui ekspor produk halal ke pasar global.⁵

Dalam perspektif ekonomi Islam, M. Umer Chapra menekankan bahwa sistem ekonomi yang sesuai syariah harus bertujuan pada keadilan sosial, keseimbangan distribusi, dan kesejahteraan masyarakat. Industri halal menjadi sarana untuk mewujudkan prinsip-prinsip tersebut karena menekankan pada kehalalan, keberkahan, dan kepedulian terhadap konsumen dan lingkungan.⁶

Selain itu, teori Triple Bottom Line yang dikembangkan oleh John Elkington menunjukkan bahwa keberhasilan bisnis modern tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tetapi juga dari dampak sosial dan lingkungan. Industri halal, dengan basis nilai-

⁴ Adam Smith, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (London: W. Strahan and T. Cadell, 1776).

⁵ David Ricardo, *On the Principles of Political Economy and Taxation* (London: John Murray, 1817).

⁶ M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 2000).

nilai etika dan keberlanjutan, sejalan dengan prinsip ini karena menjunjung aspek moral dan tanggung jawab sosial dalam kegiatan ekonomi.⁷

Menurut Sutoro Eko, pembangunan yang efektif adalah pembangunan yang bertumpu pada potensi lokal. Industri halal merupakan kekuatan lokal Indonesia yang lahir dari budaya, agama, dan struktur sosial masyarakat Muslim, sehingga memiliki keunggulan domestik yang kuat dan daya tawar tinggi di pasar internasional.⁸

Kontribusi PDB Terhadap Perekonomian

Dalam konteks pembangunan ekonomi, PDB menjadi parameter penting dalam mengevaluasi keberhasilan kebijakan ekonomi nasional. Sukirno menambahkan bahwa PDB juga mencerminkan efisiensi penggunaan sumber daya ekonomi dalam menghasilkan output barang dan jasa.⁹ Peningkatan PDB menandakan adanya pertumbuhan ekonomi yang umumnya disertai dengan peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan meningkatnya investasi, baik dari sektor domestik maupun asing. Oleh karena itu, PDB kerap dijadikan tolok ukur utama dalam penyusunan kebijakan fiskal dan moneter oleh pemerintah.

Dari perspektif teori ekonomi, dalam pendekatan Keynesian, pertumbuhan PDB sangat dipengaruhi oleh permintaan agregat, di mana belanja pemerintah dan investasi swasta memegang peran sentral dalam mendorong ekspansi output nasional.¹⁰ Sementara itu, teori pertumbuhan ekonomi klasik menyebutkan bahwa PDB akan meningkat secara berkelanjutan seiring adanya akumulasi modal, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan kemajuan teknologi.¹¹ Teori pertumbuhan Rostow juga mengaitkan pertumbuhan PDB sebagai penanda transisi suatu negara dari tahap tradisional menuju tahap kematangan ekonomi⁶. Dengan demikian, kontribusi PDB terhadap perekonomian suatu negara tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga mencerminkan kualitas dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

⁷ John Elkington, *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business* (Oxford: Capstone Publishing, 1997).

⁸ Sutoro Eko, *Pembangunan Berbasis Potensi Lokal* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016).

⁹ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, Edisi Ketiga (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 57.

¹⁰ Mankiw, *Principles of Economics*, hlm. 498.

¹¹ Todaro, Michael P., dan Stephen C. Smith, *Economic Development*, 12th ed. (Essex: Pearson Education, 2015), hlm. 116–120.

PERAN INDUSTRI HALAL DALAM MEMPERKUAT PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

Potensi Sumber Daya Manusia

Todaro dan Smith dalam buku *Economic Development* menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan peningkatan pendapatan, tetapi juga menyangkut pemerataan kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan masyarakat. Industri halal mendukung hal ini dengan memberikan akses yang luas bagi pelaku UMKM, serta membuka potensi pasar ekspor yang besar bagi produk dalam negeri.¹² Dari sudut pandang teori sumber daya manusia, Theodore W. Schultz dan Gary Becker menyatakan bahwa investasi pada manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan kesehatan akan meningkatkan produktivitas yang berujung pada pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks industri halal, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan halal, sertifikasi, dan pendampingan UMKM merupakan bentuk nyata dari penerapan teori ini.¹³

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur (*library research*). Metode ini digunakan untuk menggali, memahami, dan menyintesis berbagai informasi yang telah tersedia terkait kontribusi industri halal terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Studi literatur memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi hasil-hasil penelitian terdahulu serta mengidentifikasi kesenjangan atau ruang pengembangan dari topik yang dikaji. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber bacaan seperti artikel ilmiah, buku, laporan penelitian, dan dokumen lain yang relevan dengan topik industri halal dan pertumbuhan ekonomi. Pemilihan sumber dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan kesesuaian tema, kualitas isi, serta keterbaruan data yang disajikan. Pengumpulan data dilakukan melalui proses penelusuran literatur. Seluruh literatur yang dipilih dianalisis dengan cermat untuk memahami berbagai sudut pandang serta temuan penting yang berkaitan dengan topik. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*), yang bertujuan untuk mengidentifikasi tema-tema utama, merumuskan hubungan antara variabel, serta menarik kesimpulan dari berbagai referensi

¹² Michael P. Todaro & Stephen C. Smith, *Economic Development*, 12th ed. (Harlow: Pearson Education, 2015).

¹³ Gary Becker, *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education*, 3rd ed. (Chicago: University of Chicago Press, 1993).

yang digunakan. Hasil analisis kemudian disusun dalam bentuk narasi yang sistematis dan dijadikan dasar untuk pembahasan serta perumusan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kontribusi Industri Halal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Industri halal terus menunjukkan pertumbuhan yang positif setiap tahunnya. Pertumbuhan ini tentunya memberikan kontribusi yang positif terhadap perekonomian Indonesia. Kontribusi tersebut bisa dilihat melalui Produk Domestik Bruto (PDB). Ekonomi syariah sudah terbukti memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar USD 3,8 miliar setiap tahunnya.¹⁴ Kontribusi terhadap PDB ini tercermin dari konsumsi masyarakat Indonesia serta kegiatan ekspor dan impor terhadap produk halal. Secara garis besar kontribusi industri halal kepada perekonomian Indonesia dapat dibagi menjadi sektor industri makanan halal, fashion halal, dan juga kosmetik halal. Tetapi yang menjadi salah satu industri halal terbesar adalah industri makanan halal.

Konsumsi masyarakat Indonesia terhadap produk halal sangat besar, bahkan termasuk yang terbesar di dunia. Tercatat pada tahun 2017 total konsumsi produk halal di Indonesia sebesar USD 200 miliar atau lebih dari 36% total konsumsi rumah tangga. Jumlah ini juga setara dengan 20% PDB Indonesia (Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2019) Konsumsi produk halal ini akan terus tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan 5,3%. Pada tahun 2025, diperkirakan tingkat konsumsi produk halal Indonesia akan mencapai USD 330,5 miliar.¹⁵ Bappenas menyatakan bahwa total konsumsi yang besar ini mayoritas berasal dari produk impor. Namun, bila kita meningkatkan produksi pada sektor industri halal, kita bisa menekan angka defisit pada neraca perdagangan.¹⁶ Bahkan, bukan hal yang mustahil bila kita juga bisa melakukan peningkatan ekspor produk halal.¹⁷ Dengan melihat konsumsi

¹⁴ Pratikto, Y., et al. (2020). Industri halal berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 429–440.

¹⁵ Tim Publikasi Katadata, “Konsumsi Produk Halal Indonesia Capai US\$330,5 Miliar pada 2025,” *Katadata.co.id*, 16 November 2020, <https://katadata.co.id/berita/2020/11/16/konsumsi-produk-halal-indonesia-capai-us3305-miliar-pada-2025>.

¹⁶ Kementerian Keuangan RI, *Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2019.

¹⁷ Bahtiar Adamsah, Ganjar Eka Subakti (2014). *Perkembangan Industri Halal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Universitas Pendidikan Indonesia Indonesian Journal of Halal Vol 5 (1).hal 71-75.

PERAN INDUSTRI HALAL DALAM MEMPERKUAT PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

Masyarakat Indonesia terhadap konsumsi produk halal yang sangat besar maka kita melihat masa depan perekonomian Indonesia di sektor industri halal yang sangat menjamin.

Industri halal memiliki pengaruh terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan. Dari segi lapangan pekerjaan, industri halal mampu membuka 170.000-330.000 lapangan pekerjaan. Kegiatan ekspor merupakan bagian dari perdagangan internasional.¹⁸ Dalam perdagangan internasional diperlukan pembiayaan yang berasal dari cadangan devisa. cadangan devisa sendiri diartikan sebagai nilai aktiva bersih luar negeri pemerintah serta bank-bank devisa yang harus dijaga untuk memenuhi keperluan transaksi internasional yang Dimana ini juga akan meningkatkan perekonomian secara masif bagi suatu negara sehingga kita dapat menganalisis bahwa kegiatan ekspor dalam sisi Industri halal akan meningkatkan perekonomian suatu negara, baik dalam skala besar maupun skala kecil. Dimana jika kita melihat dalam sudut paandang yang sempit dalam artian sekla kecil maka kita dapat melihat produksi barang ekspor dalam skala UMKM. Namun jika kita melihat kegiatan ekspor dalam skala besar maka analisis kita tentunya akan berfokus pada banyak hal, yang Dimana contohnya instrument ekonomi misalnya Bank sebagai pelaku ekonomi dalam skala besar yang memainkan alur transaksi prekonomian sehingga secara tidak langsung akan menghidupkan transaksi perekonomian suatu negara. Jika kita melihat data dari tahun 2020 maka kita dapat menyebutkan bahwa ada sekitar 7,83 miliar dolar as yang terhitung dalam transaksi eskpor negara Indonesia.

2. Korelasi Peningkatan Produk Domestik Bruto dan Industri Halal

Produk Domestik Bruto merupakan nilai total dari seluruh barang atau jasa akhir yang diproduksi oleh suatu negara dalam periode waktu tertentu, biasanya satu tahun. PDB digunakan sebagai indicator utama untuk mengukur Kesehatan ekonomi suatu negara. Lebih lanjut PDB dapat diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu (biasanya per tahun). Produk Domestik Bruto ini menghitung hasil produksi suatu

¹⁸ Muhammad Anwar Fathoni, Tasya Hadi Syahputri (2020). *Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan*. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol 6(03) 428-435.

perekonomian tanpa memperhatikan siapa pemilik faktor produksi tersebut.¹⁹ Sehingga Ketika PDB mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, hal ini menandakan adanya pertumbuhan ekonomi disuatu negara. Sebaliknya, jika PDB menurun, maka bisa menjadi indikator adanya perlambatan ekonomi atau bahkan resesi. Dengan demikian, PDB menjadi alat evaluasi untuk melihat seberapa baik perekonomian suatu negara berkembang.

Maka untuk kemudian untuk melihat bagaimana kontribusi industri halal kepada perekonomian yang ada di Indonesia, langkah pertama kita harus memperhatikan bagaimana peningkatan PDB yang ada di Indonesia, kemudian melihat seberapa besar kontribusi industri halal terhadap PDB. Pertama harus dapat dipahami sebagai sebuah negara dengan mayoritas penduduk muslim, maka perekonomian yang ada di Indonesia sangat di pengaruhi oleh industri halal, dimana per tahun 2023 indonesia memiliki asset sekitar US\$279 miliar. Dengan proyeksi pertumbuhan tahunan sebesar 14,2%, nilai pasar ini diperkirakan akan meningkat menjadi sekitar **US\$ 870** miliar pada tahun 2030, sehingga industri halal mempunyai kesempatan untuk dapat berkembang dan memberikan kontribusi kepada penguatan perekonomian Indonesia.

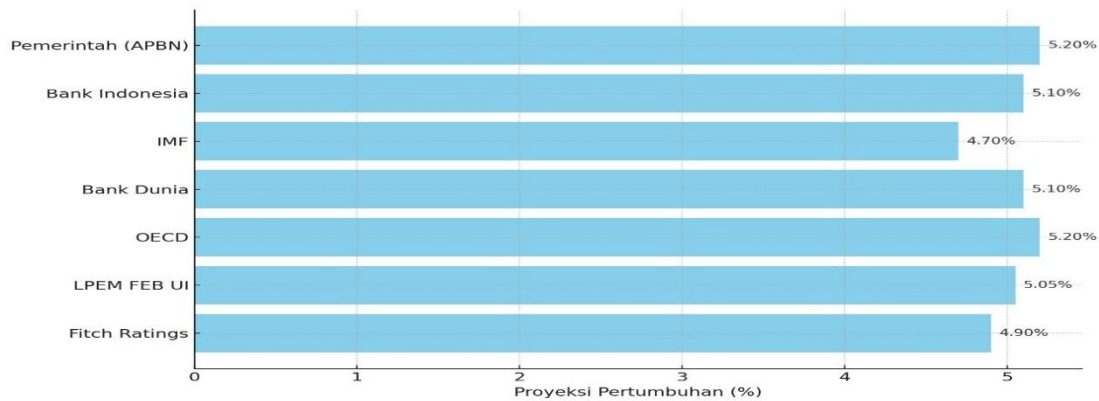
Pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan data yang baik. Dengan angka pertumbuhan perekonomian menurut BPS di tahun 2024 sebesar 5,03% secara tahunan (c-to-c), Dimana pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan investasi, belanja pemilu, dan penyelesaian proyek infrastruktur. Bank Indonesia memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 berada pada kisaran 4,7% hingga 5,5%, dimana proyeksi ini mempertimbangkan dampak kebijakan tarif dagang dari negara Amerika Serikat yang dapat menurunkan ekspor Indonesia ke AS serta permintaan mitra dagang utama lainnya seperti Tiongkok.²⁰ Berikut adalah grafik yang menjelaskan bagaimana proyeksi pertumbuhan perekonomian Indonesia:

¹⁹ Sukirno, Sadono. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 34.

²⁰ Bank Indonesia. *Pernyataan Resmi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2025*.

PERAN INDUSTRI HALAL DALAM MEMPERKUAT PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

Gambar 2. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2025 dari Berbagai Lembaga



Sumber: Diolah dari data Kementerian Keuangan (2024), Bank Indonesia (2024), IMF (2024), Bank Dunia (2024), OECD (2024), LPEM FEB UI (2024), dan Fitch Ratings (2025).

Grafik ini menunjukkan proyeksi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2025 menurut beberapa lembaga nasional dan internasional. Pemerintah Indonesia melalui RAPBN 2025 menargetkan pertumbuhan sebesar 5,2%, sementara Bank Indonesia memproyeksikan kisaran 4,7%–5,5%. Lembaga lain seperti IMF, Bank Dunia, dan Fitch Ratings memberikan estimasi berkisar antara 4,7% hingga 5,1%. Perbedaan proyeksi mencerminkan beragam asumsi makroekonomi global dan domestik, termasuk risiko ketidakpastian eksternal, stabilitas fiskal, serta dinamika konsumsi dan investasi nasional.

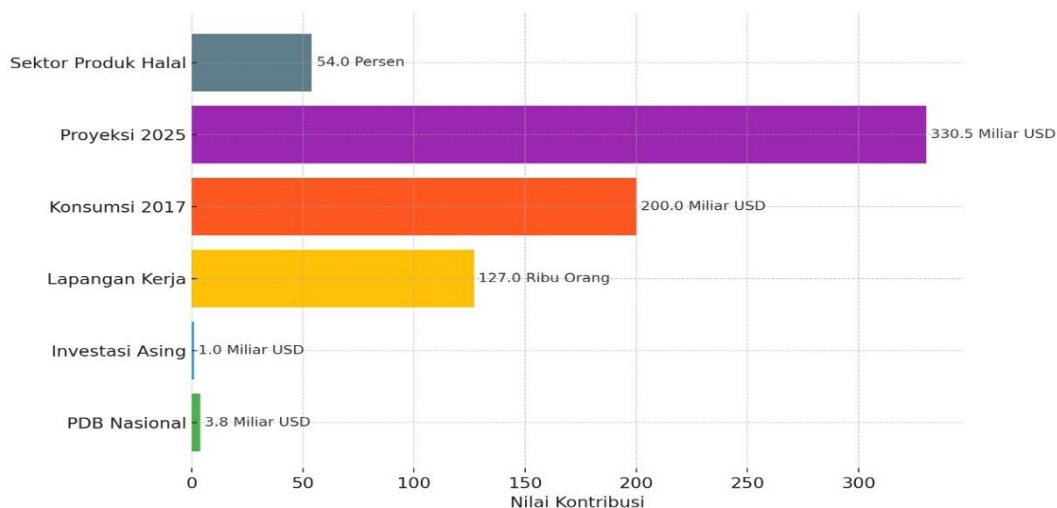
Ekonomi halal dapat meningkatkan produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar USD 5,1 miliar atau sekitar Rp72,9 triliun pertahun melalui peluang ekspor dan investasi. Indonesia juga merupakan pasar dengan konsumen halal terbesar di dunia dengan sekitar 230 juta penduduk Muslim. Nominal industri halal di Indonesia dalam bidang ekspor mampu mencapai angka USD 42,33 miliar pertahun 2023. Dengan demikian terdapat surplus perdagangan produk halal sebesar USD 31,23 miliar (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2023). Persentasi nilai ekspor sektor industri halal Indonesia bertumpu pada sektor makanan yaitu sebesar USD 34,74 miliar, USD 546,03 juta dari sektor farmasi, USD 362,49 juta dari sektor

kosmetik, serta USD 6,68 miliar dari sektor fashion. Sedangkan untuk sektor-sektor lainnya masih memerlukan pemberdayaan guna mencapai kapasitas maksimal.

Industri halal indonesia dalam bidang ekspor mampu mencapai angka USD 42,33 miliar per tahun 2023, dengan tingkat impor diangka USD 11,10 miliar. Dengan demikian terdapat surplus perdagangan produk halal sebesar USD 31,23 miliar.²¹ Kontribusi sektor industri halal terhadap PDB indonesia mampu mencapai USD 5,1 miliar atau sekitar ^{Rp} 72, 9 triliun melalui peluang ekspor dan investasi. Tetapi jika dilihat berdasarkan data maka kita akan mengetahui bahwa ekspor bertumpu pada sektor makanan dengan USD 34,74 miliar, dari sektor farmasi 546,03 miliar dolar, dari sektor kosmetik USD 362,49 juta, dan USD 6, 68 miliar dari sektor fashion.²²

Untuk perbandingan pada tahun 2025, berikut merupakan grafik yang menjelaskan bagaimana kontribusi setiap sektor industri halal kepada perekonomian indonesia per tahun 2025 :

Gambar 3. Grafik Kontribusi Industri Halal Terhadap Perekonomian Indonesia



Sumber: Diolah dari Kementerian Keuangan RI (2023), Global Islamic Economy Report (2022), dan Jurnal Aktualita Vol. 5 No. 2 (2024).

²¹ Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, *Masterplan Industri Halal Indonesia 2023–2029* (Jakarta: KNEKS, 2023), hlm. 15.

²² “KIMEFE: Potensi Industri Halal dalam Mendongkrak PDB Indonesia,” KIMEFE UNNES, diakses 18 Mei 2025, <https://sites.unnes.ac.id/kimefe/2024/05/potensi-industri-halal-dalam-mendongkrak-pdb-indonesia/>.

PERAN INDUSTRI HALAL DALAM MEMPERKUAT PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

Grafik di atas menunjukkan kontribusi sektor industri halal terhadap perekonomian nasional Indonesia berdasarkan beberapa indikator utama. Sektor konsumsi produk halal diperkirakan mengalami peningkatan signifikan dari USD 200 miliar pada tahun 2017 menjadi USD 330,5 miliar pada tahun 2025. Selain itu, industri halal juga menyumbang USD 3,8 miliar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) per tahun, serta menarik investasi asing sebesar USD 1 miliar. Sektor ini turut membuka lapangan kerja baru sekitar 127.000 per tahun dan mencakup 54% dari sektor produk halal secara keseluruhan. Data ini mengindikasikan bahwa industri halal merupakan pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.

3. Perkembangan Industri Halal Indonesia di Ranah Internasional

Menganalisa sejauh mana kontribusi industri halal kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak hanya akan berhenti kepada Analisa kepada pertumbuhan yang ada didalam negeri, tetapi juga menganalisa sejauh mana Indonesia melalui industri halal dapat berperan dalam perekonomian global, yang tentunya akan memberikan profit kepada negara Indonesia. Sebagai sebuah alat untuk menganalisa sejauh mana Indonesia bereperan dalam perekonomian internasional khususnya industri halal, Dimana menurut *State Of The Global Islamic Economy Report 2023/2024*. Indonesia naik satu peringkat untuk mengamankan posisi ketiga secara global, hanya dibelakang Malaysia dan Arab Saudi. Tonggak Sejarah ini mencerminkan meningkatnya keunggulan Indonesia diseluruh sektor utama, termasuk makanan dan minuman halal, keuangan islam, mode sederhana, pariwisata halal dan media. Lagi-lagi dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa dan sekitar 87% beragama islam, Indonesia memiliki posisi unik untuk memimpin pasar halal global, yang diproyeksikan mencapai USD 2,6 triliun pada tahun 2025.

Sektor makanan halal tetap menjadi pilar terkuat Indonesia, dengan ekspor makanan olahan, minuman, dan produk pertanian yang menghasilkan pendapatan signifikan. Sementara itu, industri busana muslim telah mendapatkan daya Tarik tersendiri, dengan desainer Indonesia yang mendapatkan pengakuan internasional atas desain inovatif mereka. Misalnya Jeny Tjahyawati – Luxurt awards, Torino Fashion Week, Anniesa Hasibuan – New York Fashion Week, Dian Pelangi –

Honoray Award dari LVMH, Nur Zahra – Penghargaan dari AAB Fashion dan Debenhams. Ini membuktikan bahwa Indonesia dapat bersaing secara global dalam hal perekonomian maupun kreatifitas sehingga bukan hal yang mengherankan jika akhirnya Indonesia mendominasi perekonomian halal internasional, mendominasi industri halal di kancah internasional. Lebih lanjut jika kita melihat data mengenai Tingkat ekspor Indonesia dalam sektor industri halal pada periode Januari-Oktober 2023, Dimana sektor makanan olahan mencatatkan capaian nilai ekspor sebesar USD 34,74 miliar, sektor farmasi USD 546,03 juta, sektor kosmetik sebesar USD 362,49 juta dan sektor pakaian muslim sebesar USD 6,68 miliar. Nilai perdagangan produk halal Indonesia pada periode Januari-oktober 2023 mencapai total sebesar USD 53,43 miliar dan impor sebesar USD 11,10 miliar. Dengan demikian, surplus perdagangan produk halal sebesar USD 31,23 miliar. Dari jumlah surplus tersebut, 87% ditopang oleh produk halal nasional. Berarti produk halal nasional mampu menyumbang sebesar 87% surplus neraca perdagangan nasional pada periode dari Januari-Oktober 2023, dengan jumlah persentase yang besar maka industri halal sudah mampu untuk memperkuat perekonomian Indonesia melalui ekspor produk halal ke ranah internasional.

Indonesia juga bisa memiliki potensi yang sangat baik dalam kegiatan perekonomian ekspor produk halal, disebabkan oleh potensi pada SDM yang dimiliki oleh Indonesia. SDM yang dimiliki oleh Indonesia saat ini sangatlah banyak, bahkan Indonesia masih kesulitan untuk menyerap tenaga kerja yang tersedia. Ini artinya jika sektor industri halal dapat terus berkembang dengan baik, maka akan lebih banyak lapangan kerja yang tercipta sehingga membuat masalah pengangguran di Indonesia juga dapat segera terselesaikan, terlepas dari semua itu Indonesia tetap memiliki potensi yang sangat besar dari hal SDM yang jika bisa dikelola dengan baik akan membuat negara Indonesia menjadi sangat produktif, dan bisa menciptakan industri yang sangat berkembang dan kuat. Dalam hal sumber daya manusia, berdasarkan laporan dari *World Talent Ranging 2024* yang dirilis oleh *international Institute of Management Development* (IMD), Indonesia menempati peringkat ke 46 dari 67 negara. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada di posisi ke 3 setelah Singapura dan Malaysia. Hal ini mencerminkan bahwa Indonesia mempunyai kesiapan tenaga kerja yang sudah cukup baik untuk sebuah industri yang mapan. Secara keseluruhan

PERAN INDUSTRI HALAL DALAM MEMPERKUAT PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

Indonesia menunjukkan kemajuan dalam daya daya saing tenaga kerja, walaupun masih diperlukan Upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas Pendidikan dan pelatihan guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja, baik dalam skala nasional maupun internasional. Dengan Kesiapan tenaga kerja yang sudah sangat baik di Negara Indonesia maka tentu saja kita mempunyai harapan yang sangat besar agar negara kita dapat bersaing dalam perekonomian melalui industri halal di kancah internasional.

Bagaimana indonesia dapat berperan secara aktif dalam perekonomian halal pada tingkat internasional, adalah bagaimana Indonesia dapat membangun relasi yang baik dengan negara negara lain. Membangun relasi semacam ini adalah dengan cara aktif untuk selalu berusaha menyuarakan atau bahkan ikut berkontribusi dalam kegiatan yang berhubungan dengan diselenggarakannya industri halal, baik dalam skala nasional maupun internasional. Indonesia sibuk memasarkan beragam produk halal ke berbagai negara. Misalnya saja, pemerintah indonesia telah membentuk badan yang menjadi otoritas melakukan notifikasi ke WTO, yaitu Badan Standardisasi Nasional. BSN bersama Komite Akreditasi Nasional (KAN) melakukan koordinasi dengan pihak terkait, yaitu BPOM, Kementerian Agama, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, MUI, dan YLKI dan pihak lain yang bergerak dalam bidang produk halal. Hal ini sejalan dengan konsep globalisasi perekonomian yang mengharuskan sebuah gagasan atau ide baru dimana penghapusan seluruh hambatan bagi arus modal, barang atau jasa.

Untuk mengakselerasi ekspor produk halal usaha kecil dan menengah (UKM), pemerintah telah mendirikan Indonesia Halal *Export Incorporated*. Inisiatif ini berfokus pada akses pasar produk halal, pembiayaan ekspor, inkubasi, produksi, dan perjanjian perdagangan dengan negara mitra. Kementerian Perdagangan juga telah melakukan upaya promosi seperti berpartisipasi dalam pameran internasional dan misi dagang ke negara-negara seperti Arab Saudi, Mesir, dan India. Trade Expo Indonesia (TEI) yang dijadwalkan pada 18-22 Oktober 2023, baik secara fisik maupun virtual, akan menjadi ajang unggulan untuk mempromosikan produk Indonesia di kancah internasional. Selain itu, Kementerian telah memfasilitasi sertifikasi halal untuk berbagai sektor, termasuk makanan dan minuman, kosmetik,

dan produk perawatan kulit, untuk meningkatkan daya saing dan mendukung pertumbuhan UKM.

4. Kebijakan Pemerintah Indonesia Untuk mengembangkan Sektor industri halal

Kawasan Industri Halal (KIH) merupakan area yang dirancang khusus untuk mengembangkan industri yang memproduksi produk halal. Dalam upaya mendukung pengembangan KIH serta industri kecil dan menengah (IKM) di Jawa Timur, sejumlah regulasi dan usaha telah diterapkan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang mengharuskan setiap pelaku usaha menengah dan kecil untuk memiliki sertifikat halal bagi produk olahan mereka. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi konsumen dan meningkatkan kualitas serta daya saing produk halal di pasar.²³ Selain itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja juga memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk memperoleh sertifikasi halal, dengan harapan dapat mempercepat proses sertifikasi serta mendorong lebih banyak pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam industri halal. Regulasi lain, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024, mengatur kewajiban bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan untuk mendapatkan sertifikat halal, yang berlaku sejak 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024.

Dalam konteks industri halal, kebijakan publik berfungsi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan mendorong pertumbuhan sektor ini. Kebijakan publik tidak hanya melibatkan pengambilan keputusan, tetapi juga mencakup implementasi dan evaluasi dari keputusan tersebut.²⁴ Di Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar di dunia, kebijakan yang mendukung industri halal menjadi sangat penting untuk memanfaatkan potensi pasar domestik dan internasional.²⁵ Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa kontribusi sektor halal terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia mencapai 4,8% pada tahun 2022, menunjukkan adanya potensi yang signifikan untuk pertumbuhan lebih lanjut. Selain

²³ Shofiyah, R. and Qadariyah, L. (2022). PEMAKNAAN SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU UMKM SEKTOR PANGAN YANG TELAH BERSERTIFIKAT HALAL DI KABUPATEN BANGKALAN. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*. 5, 2 246–259.

²⁴ Adolph, L.C. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Jakarta: CV Budi Utama, 2016.

²⁵ Ahmad Zainul Abidin dan Zakiyyah Ilma Ahmad, *Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Mendorong Pertumbuhan Industri Halal di Indonesia*, *Tijaratuna: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 4, 2023.

PERAN INDUSTRI HALAL DALAM MEMPERKUAT PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

itu, terdapat peningkatan permintaan global terhadap produk halal, yang diperkirakan mencapai USD 2,3 triliun pada tahun 2024. Oleh karena itu, kebijakan publik yang efektif dalam mendorong pertumbuhan industri halal harus mampu menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada. Kebijakan publik dalam konteks industri halal mencakup berbagai aspek, mulai dari regulasi, sertifikasi, hingga promosi produk halal. Pemerintah Indonesia melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah mengeluarkan berbagai peraturan yang bertujuan untuk mempermudah proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ini menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan industri halal di Indonesia.²⁶

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang mencakup pengembangan industri halal sebagai salah satu prioritas. Pemerintah menargetkan peningkatan kontribusi sektor halal terhadap PDB nasional serta peningkatan jumlah produk halal yang bersertifikat. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Dalam RPJMN tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya pengembangan riset dan inovasi dalam industri halal. Dengan adanya dukungan terhadap penelitian dan pengembangan, diharapkan akan muncul produk-produk halal yang lebih berkualitas dan berdaya saing tinggi. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan akses pelaku usaha, terutama UMKM, terhadap pasar global melalui program-program yang mendukung ekspor produk halal. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan perekonomian, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan adanya RPJMN yang jelas dan terarah, diharapkan industri halal di Indonesia dapat tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan berbagai regulasi dan kebijakan untuk mendukung pengembangan industri halal. Salah satu langkah penting adalah pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang bertugas

²⁶ Santoso, M. S. B., Zakiyyah Ilma Ahmad, & Muhammad Nasiruddin. (2024). *ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN INDUSTRI HALAL DI INDONESIA*. *TIJAROTANA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, vol 5(2) hal 3

untuk mengelola sertifikasi halal dan memastikan bahwa produk yang beredar di pasar memenuhi standar halal yang ditetapkan. BPJPH berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal.

Pemerintah juga tentunya tetap berupaya untuk membuat proses sertifikasi halal menjadi lebih sederhana bagi pelaku usaha, terutama UMKM. Kebijakan pemerintah yang lebih ramah terhadap pelaku usaha, diharapkan akan semakin meningkatkan produk halal yang bersertifikat dan dapat bersaing. Regulasi yang jelas dan transparan akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam mengembangkan produk halal. Dalam upaya meningkatkan kualitas produk halal, pemerintah juga bekerja sama dengan lembaga internasional untuk mengadopsi standar internasional dalam sertifikasi halal. Hal ini penting untuk memastikan bahwa produk halal Indonesia dapat diterima di pasar global dan memenuhi ekspektasi konsumen Internasional. Dengan dukungan regulasi dan standarisasi yang kuat, industri halal di Indonesia diharapkan dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Investasi di sektor halal, termasuk makanan, kosmetik, dan fashion, mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pada tahun 2021, total investasi di sektor halal mencapai Rp 30 triliun, meningkat 25% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini dipicu oleh berbagai insentif yang diberikan pemerintah, seperti pengurangan pajak dan kemudahan perizinan. Contoh nyata dari peningkatan investasi ini dapat dilihat pada pengembangan Kawasan Industri Halal di Bintan, Kepulauan Riau. Kawasan ini dirancang untuk menjadi pusat produksi dan distribusi produk halal, yang menarik minat investor lokal dan internasional. Dengan adanya fasilitas yang memadai dan dukungan regulasi, banyak perusahaan besar yang berinvestasi di kawasan ini, seperti Unilever dan Nestle, yang berkomitmen untuk memproduksi produk halal. Selain investasi, kebijakan pemerintah juga berkontribusi pada peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya produk halal. Melalui kampanye edukasi dan sosialisasi, masyarakat semakin memahami nilai dan manfaat dari produk halal. Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan MUI, sekitar 70% masyarakat Indonesia kini lebih memilih produk yang bersertifikat halal.²⁷

²⁷ Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2023). *Laporan realisasi investasi triwulan IV 2023*. <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/laporan-realisasi-investasi-triwulan-iv-2023>

PERAN INDUSTRI HALAL DALAM MEMPERKUAT PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

5. Pengaruh Kesadaran Masyarakat dalam Pertumbuhan Ekonomi Industri Halal

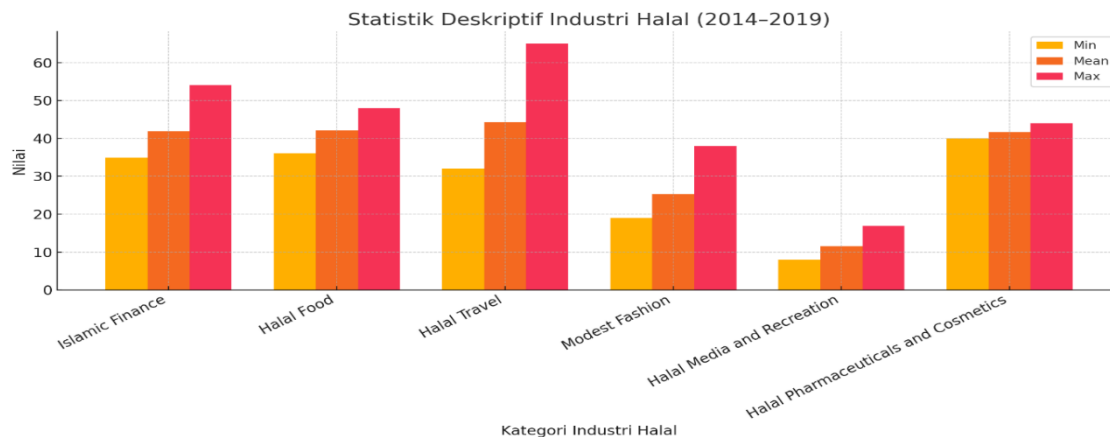
Kesadaran masyarakat merupakan pengertian dan perhatian yang dimiliki oleh individu atau kelompok terhadap berbagai permasalahan yang terjadi di sekelilingnya, baik yang bersifat sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Tingkat kesadaran ini memiliki peran krusial dalam mendorong keterlibatan publik dalam beragam aktivitas, termasuk dalam pengembangan sektor halal, kesadaran masyarakat dapat diartikan sebagai tingkat pemahaman seseorang terhadap produk maupun jasa yang tersedia, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi kehidupan mereka secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kerangka industri halal, kesadaran ini mencakup pengenalan akan pentingnya konsumsi produk halal serta dampak positifnya terhadap aspek kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Indonesia menyumbang 13% populasi muslim di dunia. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar dunia, sebesar 231 juta jiwa penduduk Indonesia beragama Islam setara dengan 86,7% total populasi penduduk Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan potensi pengembangan produk halal yang sangat besar. Indonesia diprediksi akan menjadi leader industri halal dunia di masa depan, jika pemerintah dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) bersama sama fokus pada pengembangan dan penguatan industri halal sebagai prioritas pembangunan perekonomian.²⁸

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan data pendukung mengenai industri Halal, kami menyajikan statistik deskriptif yang menggambarkan mean (rata-rata), maksimum, dan minimum dari setiap variabel penelitian. Statistik deskriptif ditunjukkan pada tabel berikut:

²⁸ Dhoya Safira Tresna Lestari, Muhammad Hamdan Ainulyaqin, Sarwo Edy,(2023). “jurnal Peran Wirausaha Berjamaah dan Individu Berkarakter dalam Penguatan Industri Halal di Indonesia” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(01), hal.326

Gambar 4. Statistik Deskriptif Industri Halal per 2014-2019



Sumber: GoodStats (2025), diolah kembali oleh penulis.

Pada tahun 2019, terdapat 65,47 juta unit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sementara di tahun 2018, UMKM berjumlah 64,19 juta unit, jumlah unit UMKM ini naik sebesar 1,98%. Persentase jumlah UMKM mencapai 99,99% dari seluruh usaha di Indonesia. Dilihat dari populasi penduduk, Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia, yang mewakili pangsa pasar yang cukup besar bagi UMKM berbasis halal dalam skala nasional²⁹. Beberapa aspek yang turut memengaruhi tingkat kesadaran masyarakat meliputi pendidikan, ketersediaan informasi, serta pengalaman individu. Pendidikan, baik yang bersifat formal maupun non-formal, mampu meningkatkan wawasan masyarakat mengenai nilai-nilai halal dan urgensi memilih produk yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Di samping itu, kemudahan dalam mengakses informasi yang relevan dan terpercaya juga memegang peran penting dalam membangun kesadaran kolektif. Berdasarkan hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia (2022), sekitar 70% responden menyatakan bahwa mereka cenderung memilih produk halal setelah memperoleh penjelasan yang komprehensif terkait manfaat serta status kehalalan produk tersebut. Selain itu, pengalaman langsung, seperti berinteraksi secara nyata dengan produk halal, turut meningkatkan kesadaran dan kecenderungan masyarakat

²⁹ Mutiara Sari, (2023) "jurnal Potensi Pasar UMKM Halal Dalam Perekonomian Indonesia", Jurnal El-Kahfi (Journal of Islamic Economic) Vol. 04, No.1, hal.2

PERAN INDUSTRI HALAL DALAM MEMPERKUAT PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

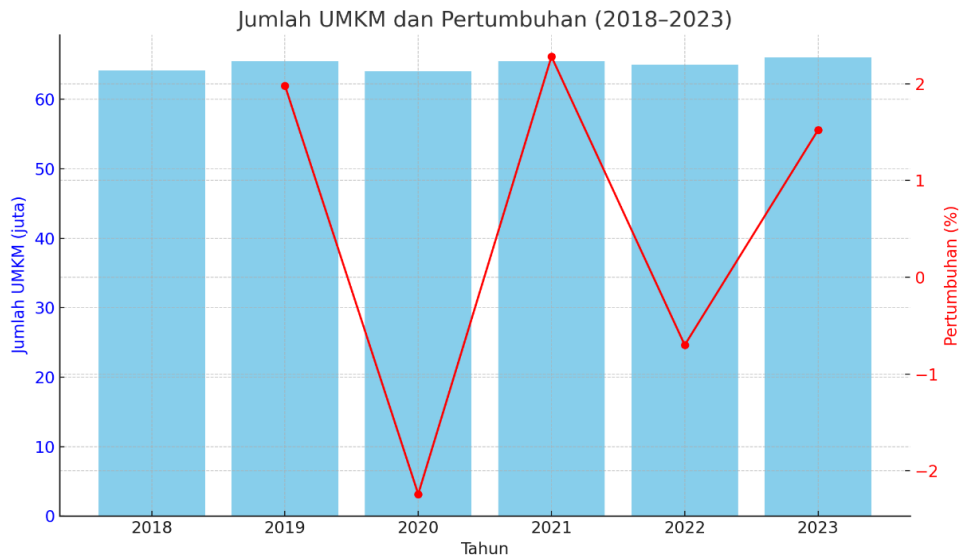
dalam memilih produk tersebut.³⁰Pertumbuhan ini tidak hanya mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi di tingkat mikro, tetapi juga menegaskan peran strategis UMKM dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan. Analisis lebih lanjut terhadap tren ini diharapkan dapat memberikan dasar yang kuat bagi perumusan kebijakan yang efektif dalam pemberdayaan UMKM di masa mendatang.

6. Peran Pelaku Individu dan UMKM Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Industri Halal

Peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Pada tahun 2023 pelaku usaha UMKM mencapai sekitar 66 juta. Kontribusi UMKM mencapai 61% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia, setara Rp9.580 triliun. UMKM menyerap sekitar 117 juta pekerja (97%) dari total tenaga kerja. Grafik di bawah mempresentasikan bagaimana peningkatan jumlah pelaku UMKM meningkat setiap tahunnya, meskipun sempat menurun pada tahun 2021 karena covid-19, masyarakat tetap memperlihatkan kontribusi mereka terhadap pertumbuhan ekonomi setelah pandemi dan nyatanya tahun berikutnya terbukti dengan digitalisasi, UMKM beralih ke cara yang lebih mudah dalam mengembangkan bisnis lebih luas dan menambah sumber pendapat

³⁰ Afifuddin Kadir, (2024)nn “Jurnal Peran Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat dalam Mendorong Pertumbuhan Industri Halal di Indonesia” : Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora, Vol 2 No 2, hal.3-4

Gambar 5. Jumlah Dan Pertumbuhan UMKM per 2018-2023



Sumber: GoodStats. (2023, November 28). Jumlah UMKM Indonesia capai 66 juta pada 2023. GoodStats. <https://data.goodstats.id/statistic/jumlah-umkm-indonesia-capai-66-juta-pada-2023-CN6TF>

Selama tahun 2023, usaha IMK menunjukkan kinerja impresif melalui tren angka pertumbuhan positif. Di Pulau Jawa, Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, DI. Yogyakarta, dan Jawa Timur stabil dengan pertumbuhan positif di sepanjang 2023. Sementara di luar Pulau Jawa, sebanyak 19 provinsi yang stabil dengan pertumbuhan positif. Fenomena ini mencerminkan perbandingan antar wilayah, aktivitas usaha IMK di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa meningkat sejalan dengan perbaikan perekonomian Indonesia selama beberapa kurun tahun terakhir. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) adalah sektor ekonomi nasional yang paling strategis dan menyangkut hidup orang banyak, sehingga menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu wirausaha masyarakat dengan kecenderungan dapat bertahan bahkan kian bertambah jumlahnya walaupun dalam masa krisis moneter (Putra, 2016). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, serta dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat,

PERAN INDUSTRI HALAL DALAM MEMPERKUAT PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.³¹

Melalui kolaborasi dengan para pemangku kepentingan terkait, kebijakan ekonomi dan keuangan syariah akan terus diarahkan untuk meningkatkan kontribusi ekonomi dan keuangan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Publikasi ini merupakan wujud nyata komitmen bersama dalam mengembangkan dan memperkuat keuangan syariah di Indonesia. Terutama ketika ada Tantangan UMKM ke depan yang harus diatasi bersama, oleh segenap stakeholders terkait antara lain berkaitan dengan inovasi dan teknologi, literasi digital, produktivitas, legalitas atau perizinan, pembiayaan, branding dan pemasaran, sumber daya manusia, standardisasi dan sertifikasi, pemerataan pembinaan, pelatihan, dan fasilitasi, serta basis data tunggal. Saat ini, Kadin Indonesia dan Pemerintah Indonesia tengah mendorong peningkatan kinerja UMKM nasional melalui strategi penerapan digitalisasi untuk meningkatkan daya saing, menjadi pemain global dan berorientasi ekspor.

Pemerintah bersama Kadin terus mendorong agar para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia bisa memasuki ekosistem digital. Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan UMKM yang bisa memasuki pasar digital akan naik menjadi 24 juta unit pada 2023 dan akan meningkat hingga 30 juta unit pada 2024. Demi bisa mencapai target tersebut, Kadin mendukung program pemerintah menginisiasi transformasi digital UMKM melalui berbagai program, diantaranya platform wikiwirausaha sejalan dengan Kemenkopukm yang membuka pusat layanan usaha terpadu³²

UMKM sejauh ini kerap menjadi katup pengaman pada masa krisis dan melalui UMKM membantu menciptakan pondasi yang kokoh untuk perekonomian masyarakat. Sektor UMKM tercatat berkontribusi besar terhadap PDB. Hal tersebut menjadi bukti bahwa sektor UMKM perlu menjadi prioritas termasuk dalam pengembangan industri halal. Bahkan dalam Konferensi G10 di Nusa Dua Bali Presiden Jokowi menyatakan bahwa pihak pemerintah telah mengupayakan akses

³¹ Imsar, Rizky Febrian Saragih, (2023), jurnal Kinerja Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Pelaku UMKM Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah (JUPEKES) Vol. 1 No. hal.3

³² Kamar Dagang dan Industri Indonesia. (n.d.). *UMKM Indonesia: Data dan Statistik*. Diakses dari <https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/>

jaringan internet murah agar terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat di era digitalisasi ini. Hal tersebut mengindikasikan adaptasi digital pada sektor UMKM sehingga dapat bersaing di pasar global³³. Mengutip dari berbagai penelitian kontribusi masyarakat memperkuat pertumbuhan ekonomi industri halal begitu signifikan terhadap PDB (produk domestik bruto) mencapai 20%. Bahkan sektor halal value chain (HVC) menopang hampir 23% dari ekonomi nasional, hal mencakup berbagai sektor seperti makanan, minuman, pariwisata, dan fashion.

Dalam LPKSI 2023, OJK melanjutkan kolaborasi dan sinergi dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dalam menyajikan potret lembaga jasa keuangan syariah (IJK) serta berbagai inisiatif kebijakan ekonomi dan keuangan syariah untuk mendukung reformasi sektor keuangan Indonesia. Laporan ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi masyarakat umum dan meningkatkan semangat kolaborasi semua pihak dalam mendorong reformasi sektor keuangan Indonesia sebagaimana diamanatkan UU PPSK melalui pengembangan dan penguatan ekonomi dan keuangan syariah.³⁴ Dan Menurut data yang dirilis oleh lembaga pusat gaya hidup halal Indonesia menyebutkan bahwa pada tahun 2020 Indonesia mewakili pasar konsumen halal terbesar di dunia, dengan total belanja konsumen sebesar \$184 miliar. Dalam diagram dibawah lebih detail menjelaskan persentase konsumsi setiap sektor industri halal di Indonesia pada tahun 2020.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Industri halal memiliki peran yang sangat strategis dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kontribusinya dapat dilihat secara nyata melalui peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, perluasan ekspor, serta pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sebagai negara

³³ Syahidin, M. Nasor, (2024) Agus Hermanto, " Jurnal Pertumbuhan Industri Halal Berbasis Usaha Mikro Kecil (UMK)", Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 7 Nomor 1, hal.146-14

³⁴ Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Indonesian Islamic Financial Development Report (LPKSI) 2023. Retrieved May 10, 2025, from <https://ojk.go.id/en/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Indonesian-Islamic-Financial-Development-Report-LPKSI-2023.aspx>

PERAN INDUSTRI HALAL DALAM MEMPERKUAT PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat industri halal global. Dukungan kebijakan dari pemerintah, seperti Undang-Undang Jaminan Produk Halal, pengembangan Kawasan Industri Halal (KIH), serta keterlibatan lembaga seperti BPJPH dan KNEKS turut memperkuat ekosistem halal nasional. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk halal yang aman, sehat, dan etis semakin memperkuat permintaan pasar terhadap produk halal dalam dan luar negeri.

Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang harus segera diatasi. Beberapa di antaranya adalah proses sertifikasi halal yang masih dirasa sulit diakses oleh pelaku UMKM, rendahnya literasi halal di masyarakat, serta kurangnya inovasi dan daya saing produk halal Indonesia di pasar internasional. Untuk itu, diperlukan strategi yang komprehensif dan kolaboratif agar potensi besar industri halal dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan antara lain: pertama, pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan literasi halal melalui edukasi, sosialisasi, dan pelatihan yang menyeluruh bagi masyarakat dan pelaku usaha. Kedua, proses sertifikasi halal harus disederhanakan, terutama untuk UMKM, dengan mengadopsi sistem digital, pemberian subsidi, dan peningkatan kapasitas lembaga pemeriksa halal. Ketiga, pemberdayaan UMKM berbasis halal harus diperkuat melalui pelatihan, pembiayaan syariah, serta pendampingan menuju pasar ekspor. Keempat, pelaku industri perlu meningkatkan inovasi dan kualitas produk agar memenuhi standar internasional dan dapat bersaing secara global. Kelima, sinergi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat sipil harus terus diperkuat untuk menciptakan ekosistem industri halal yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Dengan langkah-langkah strategis tersebut, industri halal Indonesia diyakini tidak hanya akan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga mampu membawa Indonesia menjadi pemimpin dalam industri halal di tingkat global.

DAFTAR REFERENSI

Adolph, S. (2016). *Understanding public policy*. Pearson Education.

- Ahmad, A. M., Fathoni, A. H., & Syahrani, R. (2023). Peran BPJPH dalam sertifikasi halal. *Jurnal Hukum Islam*, 8(2).
- Ahmad, Z. I., Abidin, Z., & Ilma Ahmad, R. (2024). Strategi kebijakan pemerintah dalam pengembangan industri halal. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(1).
- Akbar, R. (2019). Ketergantungan impor produk halal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Perdagangan*, 7(1).
- Amalia, R., & Pangestoeti, M. (2024). Kawasan industri halal sebagai pendorong investasi. *Jurnal Manajemen Investasi*, 6(3).
- Arifin, A., Nugroho, D., & Maulana, F. (2024). Program ekspor produk halal: Tantangan dan peluang. *Jurnal Ekonomi Islam Global*, 9(1).
- Azizah, N., Rahman, T., & Utami, D. (2022). Potensi produk halal di pasar global. *Indonesian Journal of Halal Studies*, 5(1).
- Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2021). *Laporan investasi sektor industri halal 2021*. BKPM.
- Becker, G. S. (1993). *Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education* (3rd ed.). University of Chicago Press.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. The Islamic Foundation.
- DinarStandard. (2022). *State of the Global Islamic Economy Report 2022*.
- Elkington, J. (1997). *Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business*. Capstone Publishing.
- Habibi, R., Kusuma, H., & Ma'ruf, M. (2024). Inovasi dan riset dalam pengembangan industri halal. *Jurnal Riset Halal*, 2(2).
- Hariani, R. (2023). Kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia dalam sektor halal. *Jurnal Ekonomi & Pembangunan*, 8(1).
- Hidayati, L., & Primadhany, A. (2021). Pentingnya sertifikasi halal pada UMK. *Jurnal Keuangan Syariah*, 5(1).
- Ibrahim, A., & Fauziah, H. (2023). Peran BPJPH dalam mempercepat sertifikasi halal bagi UMKM. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2).
- Indonesia Halal Lifestyle Center. (2018). *Indonesia halal market report 2018*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Laporan PDB dan kontribusi sektor halal tahun 2019*.

PERAN INDUSTRI HALAL DALAM MEMPERKUAT PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2020). *Data perkembangan UMKM di Indonesia tahun 2020*.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing management* (15th ed.). Pearson.
- Kurniawan, B. (2023). Penerapan PP Nomor 42 Tahun 2024 dan tantangannya. *Jurnal Hukum Produk Halal*, 2(1).
- Madjid, M., Syamsuddin, R., & Putri, N. (2022). Potensi populasi Muslim dalam industri halal. *Jurnal Demografi Islam*, 6(2).
- Mujahida Ahmad, A., Fauzan, M., & Sari, D. (2023). Regulasi halal dan sertifikasi global. *Jurnal Regulasi dan Bisnis Halal*, 3(1).
- Nasirin, M. K., & Ahfadz, A. (2022). Peran insentif pajak dalam menarik investasi halal. *Jurnal Keuangan Islam Indonesia*, 5(2).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Indonesian Islamic Financial Development Report (LPKSI) 2023*. <https://ojk.go.id>
- Pardiansyah, R., & Abduh, M. (2022). Sertifikasi halal pada UMK: Masalah dan solusi. *Jurnal Industri Halal dan UMKM*, 4(1).
- Pratama, M. Z., & Warliana, R. (2023). RPJMN dan prioritas pembangunan industri halal. *Jurnal Strategi Pembangunan Nasional*, 7(3).
- Putra, Y. A. (2016). Peran UMKM dalam menghadapi krisis moneter. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 3(2).
- Rahmawati, T. (2021). Pengaruh pengalaman terhadap kesadaran produk halal. *Jurnal Perilaku Konsumen*, 4(2).
- Ricardo, D. (1817). *On the principles of political economy and taxation*. John Murray.
- Saefullah, H., Fadillah, R., & Astuti, W. (2023). Ketahanan UMK di era pandemi. *Jurnal Ketahanan Ekonomi Halal*, 3(1).
- Schultz, T. W. (1971). *Investment in human capital: The role of education and of research*. Free Press.
- Shofiyah, I., & Qadariyah, M. (2022). Kawasan industri halal di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Islam Terapan*, 6(2).
- Singgih, H. (2007). UMKM sebagai tulang punggung ekonomi. *Jurnal Ekonomi Nasional*, 1(1).
- Smith, A. (1776). *An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations*. W. Strahan and T. Cadell.

- Sulistiani, D. (2019). Label halal sebagai alat komunikasi pemasaran. *Jurnal Komunikasi Bisnis*, 4(1).
- Sutoro, E. (2016). *Pembangunan berbasis potensi lokal*. Gadjah Mada University Press.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12th ed.). Pearson Education.
- Undari, M., & Lubis, I. (2021). Peran UMKM dalam pemulihan ekonomi nasional. *Jurnal Ekonomi Mikro Indonesia*, 9(1).
- Utama, W., & Sartika, N. (2017). Strategi penguatan UMKM melalui pembiayaan syariah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 5(1).
- Z. I. Ahmad, A., Ilma Ahmad, R., & Abidin, Z. (2024). Strategi pemerintah dan ekosistem halal nasional. *Jurnal Ekonomi Syariah Global*, 10(2).